

**UPAYA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH**

**MELALUI RETRIBUSI PARKIR**

**(Studi Deskriptif Kualitatif di Dinas Pendapatan Daerah**

**Kabupaten Sleman, DIY)**



**Disusun Oleh :**

**ALBERTUS**  
**13520015**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN SEKOLAH TINGGI  
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2018**

**UPAYA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH  
MELALUI RETRIBUSI PARKIR  
(Studi Deskriptif Kualitatif di Dinas Pendapatan Daerah  
Kabupaten Sleman, DIY)**



**Disusun Oleh :**

**ALBERTUS**  
**13520015**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN SEKOLAH TINGGI  
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

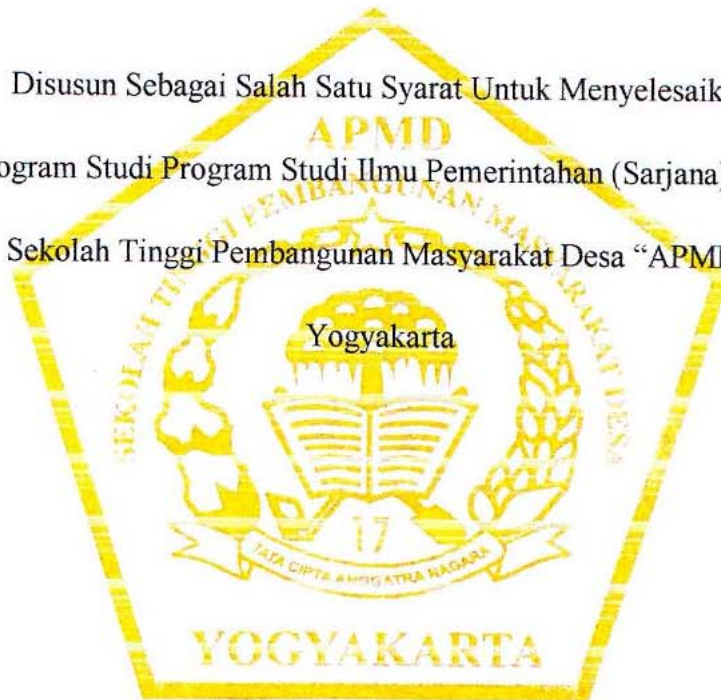
**YOGYAKARTA**



**UPAYA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH  
MELALUI RETRIBUSI PARKIR  
(Studi Deskriptif Kualitatif di Dinas Pendapatan Daerah  
Kabupaten Sleman, DIY)**

**SKRIPSI**

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan  
Program Studi Program Studi Ilmu Pemerintahan (Sarjana) pada  
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”



**Disusun Oleh :**

**ALBERTUS**

**13520015**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA  
“APMD”**

**YOGYAKARTA**



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 5 April 2018  
Pukul : 10.00  
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

### TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

**Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si**  
Ketua/Penguji/Pembimbing



**Dr. Supardal, M. Si**  
Penguji Samping 1



**Leslie Retno Angeningsih, Ph. D**  
Penguji Samping 2



Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan (Sarjana)



**Gregorius Saldan, S.IP., MA.**

## **MOTTO**

**WALAUPUN AIR MATA MENGALIR, NAMUN JANGAN SEKALI-KALI  
KAMU MENJADI JIWA YANG CENGENG**

Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik, yang penting terus berusaha dan berdoa, percaya semua akan baik-baik saja dan pintu kesuksesan ada didepan mata.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rahmat Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai dalam hidupku dan seizin-Nya sehingga skripsi yang ku kerjakan ini dapat selesai. Dan karyaku ini ku persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, karena atas segala kemurahan dan perlindungan-Nya maka aku dapat menyelesaikan skripsiku ini dengan baik.
2. Kedua orang tuaku, Ibu Margareta Asam dan Ayahku Raymundus Anju saya mengucapkan terimakasih banyak atas segalanya, karena kalianlah aku bisa sekolah sampai menyelesaikan S1 baik dorongan, dukungan dan sebagainya.
3. Saudara-saudariku, bang Hermanus, kak Rika Lusua, bang Stevanus, bang Yohanes, bang Lusius, dan kak Kalista, kalian semua telah menjadi bagian dari penyemangatku disetiap waktu.
4. Teman seangkatanku Aryo Martines, Albertus, Pelisianus Hendry, Miranda Wulandari dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu mendukung dan menyemangatiku dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabatku WMG, PISANG FC dan yang lainnya yang selalu memberikan dorongan dan menghiburku disaatku lemah dan jatuh, semoga cepat nyusul skripsi dan cepat lulus.

Terima kasih semuanya kalian merupakan bagian dari perjalanan hidupku. Semoga masa depan kita sukses dan bahagia.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ku haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kuasa dan rahmat-Nya yang selalu berlimpah untuk kehidupanku dan yang telah menyertaiku dalam mengerjakan skripsi ini yang berjudul **PENGEMBANGAN DESA WISATA** dapat diselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjan Ilmu Pemerintahan pada SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD” YOGYAKARTA. Penulis menyadari keberhasilan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari pihak kampus si penulis. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Habib Muhsin, S.Sos., M.Si. selaku ketua STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari ilmu pengetahuan di STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP, M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan saran dan kritik untuk penulis yang sangat bermanfaat.
3. Ibu Dra. Herawati, MPA. sebagai Dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan dorongan kepada saya dari awal masuk kuliah sampai penyelesaian skripsi saya.
4. Bapak Drs. Suharyanto, MM, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan segenap tenaga, waktu, saran, pengetahuan dan arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini mulai dari awal sampai dengan selesai, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Dosen penguji I yaitu Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si., dan juga dosen penguji II yaitu Dra. Herawati, MPA., yang telah bersedia menguji karya saya ini.
6. Bapak/ibu Dosen, yang telah banyak memberikan materi kuliah khususnya dosen jurusan Ilmu Pemerintahan dan Seluruh staff serta karyawan-karyawan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi peneliti maupun pihak-pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, Maret 2018

(Dominikus)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR BAGAN .....	x
INTISARI.....	xi
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Kerangka Konseptual .....	12
1. Pengertian Pariwisata.....	12
2. Jenis-jenis Pariwisata.....	14
3. Prinsip-Prinsip perencanaan Pariwisata .....	15
4. Komponen Pengembangan Pariwisata.....	18
5. Pengertian Desa Wisata .....	20
6. Kriteria Desa Wisata .....	21
7. Komponen Desa Wisata.....	24
8. Pengembangan Kawasan Desa Wisata .....	24
a. Pendekatan Pasar Dalam Pengembangan Desa Wisata.....	24
b. Pendekatan Fisik Pengembangan Desa Wisata .....	26
c. Prinsip Dasar dari Pengembangan Desa Wisata .....	27
d. Jenis Wisatawan Pengunjung Desa Wisata .....	28
e. Tipe Desa Wisata .....	29
9. Peraturan Tentang Pariwisata.....	30
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	31
F. Metode Penelitian.....	32
1. Jenis Penelitian .....	32
2. Unit Analisis.....	33



3. Teknik Pengumpulan Data .....	38
a. Observasi .....	39
b. Wawancara .....	40
c. Dokumentasi .....	41
4. Teknik Analisis Data .....	43

## BAB II

A. Profil Desa Sambirejo .....	46
1. Letak Wilayah Desa.....	46
2. Luas Wilayah.....	47
3. Penggunaan Lahan.....	48
4. Sumber Daya Alam .....	48
5. Karakteristik Desa .....	50
6. Struktur Perekonomian Desa .....	51
7. Kemampuan Keuangan Desa .....	53
8. Prasarana dan Sarana Ekonomi .....	54
9. Kependudukan.....	54
10. Kesehatan.....	55
11. Kesejahteraan Sosial.....	56
12. Pendidikan.....	57
13. Ketenagakerjaan .....	58
14. Kesenian dan Kebudayaan.....	60
15. Agama.....	61
16. Keadaan Pemerintahan dan Kelembagaan Desa Sambirejo .....	62
B. Obyek Wisata Tebing Breksi .....	63
1. Gambaran Umum Tebing Breksi .....	63
2. Struktur Organisasi Pengelola Tebing Breksi .....	65
3. Fasilitas-fasilitas di Tebing Breksi .....	66

### BAB III

Analisis Tentang Pengembangan Desa Wisata .....	67
A. Pengembangan Desa Wisata Tebing Breksi .....	68
B. Pengelolaan Tebing Breksi.....	79
C. Sarana Prasarana di Tebing Breksi .....	81
D. Kendala-kendala yang dihadapi .....	85

### BAB IV

A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	91

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

### INTERVIEW GUIDE

## DAFTAR TABEL

1.1. Deskripsi Informan Berdasarkan Pekerjaan .....	35
1.2. Deskripsi Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	36
1.3. Jumlah Informan Berdasarkan Usia .....	37
1.4. Deskripsi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin .....	38
2.1. Penggunaan Lahan Desa Sambirejo .....	48
2.2. Jenis Penambangan Galian C .....	52
2.3. Potensi Sektor Peternakan Desa Sambirejo .....	52
2.4. Kependudukan Desa Sambirejo .....	55
2.5. Jumlah Jenis Fasilitas Pendidikan Desa Sambirejo .....	58
2.6. Mata Pencarian Desa Sambirejo .....	59
2.7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....	61

## DAFTAR BAGAN

2.1 Struktur organisasi Pemerintahan Desa Sambirejo.....	62
2.2 Struktur organisasi pengelola Tebing Breksi.....	65

## INTISARI

Dalam penelitian ini judul yang diangkat adalah Pengembangan Desa Wisata, penelitian dilakukan di Obyek Wisata Tebing Breksi di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan yang dialami desa saat ini bahwa banyak desa yang belum sadar akan manfaat maupun nilai lebih dari mengembangkan wisata di desa, dari bidang wisata desa dapat memajukan perekonomiannya. Sadar akan pentingnya mengembangkan wisata di desa merupakan langkah awal untuk maju menjadi lebih baik, maksudnya melalui wisata desa dapat menjadi lebih maju, mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mampu menciptakan lapangan usaha, mampu meningkatkan ekonomi desa maupun masyarakat, dan juga mampu untuk meningkatkan devisa negara. Penelitian ini berusaha untuk mengkaji pengembangan desa wisata Tebing Breksi, pengelolaan wisata Tebing Breksi, sarana prasarana Tebing Breksi dan kendala-kendala yang dihadapi.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai adanya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi terhadap masyarakat setempat, kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, pokdarwis, pengelola objek wisata, pelaku usaha/masyarakat, dan pengunjung. Peneliti dalam menganalisis data menggunakan data kualitatif dengan sifat deskriptif.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dikembangkan di Objek Wisata Tebing Breksi adalah Tebing Breksi yang dulunya tempat pertambangan kemudian dialihkan menjadi tempat wisata, kemudian dibangunlah spot-spot yang menarik untuk dinikmati wisatawan, adanya kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, ada Promosi yang dilakukan untuk memperkenalkan Tebing Breksi ke publik yang dimana promosi tersebut dilakukan melalui media sosial dari mulut ke mulut dan juga di promosikan oleh komunitas peduli wisata dan dibangun fasilitas-fasilitas atau sarana dan prasarana seperti toilet, *foodcourth*, *resto*, *glamping*, *camping area*, *homestay*, lanskap dan lain-lain dan juga ada jeep pariwisata serta ATV, dan juga pembenahan akses jalan menuju Tebing Breksi. Kendala yang dihadapi adalah merubah *mindset* masyarakat sekitar, manajemen yang berbeda latarbelakang usia maupun pendidikan, kesalahpahaman antar pengelola dan Pemerintah Daerah tentang retribusi masuk Objek Wisata, dan konflik yang terjadi antar masyarakat dan pemerintah desa tentang pengalihan dari pertambangan menjadi tempat wisata.

**(Kata Kunci: Pengembangan Desa Wisata, Promosi, sarana/prasarana)**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Demokratisasi mulai dilaksanakan pada saat Reformasi. Perubahan yang sangat signifikan yang dapat dirasakan adalah sistem pemerintahan yang bersifat Otoriter saat Orde Baru berubah menjadi sistem Demokrasi masa Reformasi.

Pemerintah pusat selalu berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera tetapi pemerintah pusat selalu mengalami kesulitan dalam mengatur dan mengelola setiap daerah yang ada di Indonesia. Berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 maka segenap potensi yang dimiliki dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah guna memperlancar pelaksanaan pembangunan yang menitik beratkan pada bidang ekonomi menuntut pemerintah agar mempersiapkan anggaran dalam jumlah yang besar. Besarnya pengeluaran dalam pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan mewujudkan rakyat yang sejahtera.

Dengan meningkatnya jumlah penduduk maka semakin meningkat juga kebutuhan penduduk. Pemerintah Pusat selalu membuat terobosan untuk dapat mewujudkan rakyat Indonesia yang sejahtera. Salah satu indikator penting yaitu kemandirian suatu daerah dalam membangun dan menjalankan semua urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, diharapkan dengan penyerahan wewenang, Pemerintah Daerah dapat lebih mandiri dan tidak tergantung lagi kepada Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat

mengharapkan pemerintah daerah dapat mengelola segala macam bentuk potensi yang dimiliki guna untuk menciptakan Rakyat yang sejahtera.

Terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menerapkan otonomi daerah dengan cara Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diganti lagi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 13 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur Otonomi Daerah yaitu penyerahan urusan-urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Pemerintah pusat mengharapkan dengan diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah dapat meratakan pembangunan dan hasilnya dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat. (sumber :Djohan, Djohermansyah, 2007).

Pada hakekatnya Otonomi Daerah merupakan hak mengurus rumah tangganya sendiri. Kemandirian dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya merupakan inti dari otonomi suatu daerah, di dalamnya terdapat hak penetapan kebijakan sendiri, pelaksanaan sendiri serta pembiayaan dan pertanggung jawab daerah sendiri. Dalam kebebasan menjalankan hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas daerah. Besarnya Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

Pada umumnya segala bentuk pengolahan dan penyajian informasi data sumber pendapatan daerah tersebut sangatlah penting, mengingat dalam mengikuti aturan yang berlaku yang sudah ditetapkan merupakan bagian dari tertib hukum. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman sesuai dengan kedudukannya sebagai pelaksana pemerintah di bidang pendapatan daerah mempunyai tugas utama atau tugas pokok dalam menggali berbagai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dari potensi yang dimiliki daerah untuk membiayai pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang No.33 Th 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Bab V pasal 6, Pendapatan asli daerah terdiri dari :

- a. Pajak daerah,
- b. Retribusi daerah,
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg sah.



Diantara berbagai sumber pendapatan daerah, maka hasil penyumbang tertinggi adalah pajak dan retribusi daerah memegang peranan penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sekaligus guna menetapkan dan memperkuat pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pada umumnya retribusi daerah, memiliki fungsi sebagai alat pengatur yaitu mengatur wajib retribusi untuk taat membayar retribusi atas jasa yang diterima demi kelancaran pembangunan yang akan dilaksanakan. Selain itu retribusi daerah juga merupakan sumber pendanaan yang sangat potensial dalam memenuhi anggaran pembangunan daerah. Salah satunya retribusi daerah tersebut berasal dari retribusi parkir.

Retribusi Parkir merupakan salah satu dari retribusi daerah yang mempunyai kontribusi dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah kabupaten Sleman. Yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 6 tahun 2015 tentang Perparkiran. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang mempergunakan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola pemerintah daerah.

Sebagaimana diketahui setiap tahun retribusi parkir selalu bertambah didorong dengan selalu bertambahnya penduduk di Daerah Kabupaten Sleman. Kepadatan penduduk yang mayoritas penduduknya berasal dari luar Jawa baik yang berlibur ataupun yang kuliah sehingga mengakibatkan kepadatan kendaraan baik roda dua ataupun roda empat. Dengan dibuatnya Peraturan Daerah tentang Parkir diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Daerah dan membiayai pembangunan daerah. Tentunya faktor pendukung tersebut tak lepas dari usaha

yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman seperti peningkatan dalam sarana dan prasarana pelayanan parkir, tersedianya tenaga kerja atau petugas yang menangani retribusi parkir, kerja sama antara petugas parkir, penataan tempat parkir dan dukungan masyarakat yang menggunakan jasa parkir yang di sediakan oleh pemerintah kabupaten sleman.

Permasalahan yang menjadi faktor penghambat yang ditemukan peneliti setelah melakukan observasi diantaranya, banyaknya juru parkir nakal yang biasanya mengenakan tarif tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan masih banyaknya pemungut parkir yang menggunakan karcis yang sudah dipakai. Lebih parahnya lagi banyak juru parkir yang tidak memberikan karcis kepada pengguna parkir sehingga uang yang diterima tidak masuk ke kas daerah tetapi masuk dompet pribadi. Selain itu masih banyak juga pelanggar yang memarkirkan kendaraan disembarang tempat padahal ada beberapa sanksi diberikan kepada pelanggar adalah pengembosan, pengembokan hingga derek kendaraan. Hal ini merupakan masalah yang harus diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman demi optimalnya pendapatan daerah karena retribusi parkir merupakan penyumbang terbesar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. (harianjogja./20150825/).

Contoh lain yang bisa disampaikan adalah kasus pemalsuan karcis parkir di Stadion Maguwoharjo belum lama ini. Menurut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Sleman masih perlu mengatur lebih ketat lagi perizinan parkir. Selain itu juga perlu mengontrol pengelolaannya. "Aspek utamanya itu penataan parkir bukan pendapatannya. Kalau penataan diatur dengan baik maka akan diikuti pendapatannya," kata Yani saat dijumpai di

kawasan Lapangan Trihanggo, Kecamatan Gamping, Minggu (23/8) sore. Terkait pemalsuan karcis parkir. Pihaknya akan meminta penjelasan kepada Dishubkominfo bagian perparkiran. Hal ini sangat meresahkan warga yang tidak paham peraturan perparkiran. Dalam kasus tersebut, selain memalsukan karcis parkir, oknum pengelola parkir ilegal juga nekat memasang tarif tinggi untuk kendaraan roda dua yakni Rp5.000,00 Padahal menurut peraturan, tarif parkir untuk roda dua di area tempat olahraga saat ada event hanya Rp 2.000,00 Sementara itu, Dishubkominfo Sleman tetap optimis target pendapatan parkir tercapai meski faktanya ada kasus pemalsuan karcis parkir. Tahun 2017 targetnya Rp1,85 miliar terdiri dari parkir tepi jalan umum Rp1,4 miliar dan tempat khusus parkir (TKP) Rp 450 juta kata Kepala Seksi Perparkiran Dishubkominfo Sleman, Bambang Sumedi Laksono. Pada tahun 2014 lalu, realisasi penerimaan retribusi tepi jalan umum Rp 1,5 miliar dan TKP Rp 240 juta. Ia optimis tahun ini bisa meningkat. Terkait pengelolaan parkir di Sleman, Sumedi mengatakan bahwa pengelolaannya dilakukan Dishubkominfo bersama pihak ketiga. Tercatat sebanyak 400-an pihak ketiga baik perseorangan maupun badan, telah bekerja sama dengan Dishubkominfo untuk mengelola parkir. (harianjogja./20160825/).

Hal ini terjadi karena masih kurangnya pengawasan Pemerintah Daerah dalam proses pendataan tempat parkir, kurangnya koordinasi antara instansi yang terkait serta sanksi yang tidak tegas kepada pegawai parkir yang nakal. Kendala seperti inilah yang menyebabkan target penerimaan dari retribusi parkir menurun. Padahal kalau dikelola dengan baik maka hasil dari retribusi dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya di Kabupaten Sleman.

Melihat kontribusi dan potensi dari Retribusi Parkir sebagai salah satu pendapatan daerah, perlu dilakukan kajian mengenai seberapa besar pengaruh dari Retribusi Parkir terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul “ Upaya Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Retribusi Parkir”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka penyusun dapat merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana Upaya Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Retribusi Parkir di Kabupaten Sleman?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir.
- b. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ahmad Yani, 2004. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Darise Nurlan.2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Indonesia: Indeks.
- Sugianto. 2007. *Pajak dan Retribusi Daerah( Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*. Jakarta: Grasindo.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Surakhmad Winarno. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*. Bandung:Tarsito.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi* Bandung: Alfabeta.
- Nawawi Dari. 1983. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Bulaksumur.
- Moeleong J Lexy. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Widoyoko Putro. 2012. *Teknik Penyusunan Instrumen Peneltian*. Yogyakarta: Celeban Timur UH III.
- Sutrisno, Hadi.1987. *Metodologi Research Jilid 2*. Yogyakarta: Andi Offset.

Kamus Besar Bahasa Indonesia 2001 tentang Pengawasan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan Revisi atas UU No.22 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Parkir.

Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sumber lain:

Leonitius Melianus Rinus Kaka. 2014,Skripsi, Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi.

<http://yogyakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/07/PERDA-15-TAHUN-2013-SLEMAN.pdf> diakses tgl 1juni2017

<http://harianjogja.bisnis.com/read/20150825/1/3426/tempat-parkir-diminta-utamakan-penataan-daripada-pendapatan> diakses tgl 31juli2017